



**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)  
dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris  
Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2023-2024)**

***The Influence of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund  
(DAU), and Capital Expenditure on Regional Financial Independence (Empirical  
Study of Regency/City Regional Governments 2023-2024)***

**Andre Salman<sup>1</sup>, Lucy Septiana Putri<sup>2</sup>, Husni Taufiq Dzakiyyah<sup>3</sup>, Mutia Fitri<sup>4</sup>,  
Muthia Deslanisa<sup>5</sup>, Siska Yulia Defitri<sup>6</sup>**

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Email: [andresalman02@gmail.com](mailto:andresalman02@gmail.com)<sup>1</sup>, [lucyseptianap@gmail.com](mailto:lucyseptianap@gmail.com)<sup>2</sup>, [husnitaufiq435@gmail.com](mailto:husnitaufiq435@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mutia031018@gmail.com](mailto:mutia031018@gmail.com)<sup>4</sup>, [deslanisam@gmail.com](mailto:deslanisam@gmail.com)<sup>5</sup>, [siskayuliadefitri@ummy.ac.id](mailto:siskayuliadefitri@ummy.ac.id)<sup>6</sup>

---

Article Info

Abstract

Article history:

Received : 21-06-2026

Revised : 23-06-2026

Accepted : 25-06-2026

Published : 27-06-2026

*This study aims to analyze the influence of Locally Generated Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Capital Expenditure on local government financial performance, as proxied by the level of regional financial independence in district/city governments in Java for the period 2023–2024. This study used quantitative methods and a population of 29 districts/cities in Java. Data were obtained through documentation from the Supreme Audit Agency (BPK) and the Central Statistics Agency (BPS). Data analysis was conducted using classical assumption tests and multiple linear regression using IBM SPSS 22. The results indicate that Locally Generated Revenue (PAD) has a positive and significant effect on regional financial independence, indicating that increasing PAD can reduce regional dependence on the central government. The General Allocation Fund (DAU) also has a significant effect on regional financial independence. Meanwhile, Capital Expenditure does not significantly influence regional financial independence because the majority of its financing still relies on transfer funds from the central government. The results of the coefficient of determination test indicate that PAD, DAU, and Capital Expenditure together explain 68.8% of the variation in regional financial independence, with the remainder influenced by factors outside the research model. This research is expected to provide consideration for regional governments in improving the effectiveness of regional financial management to achieve greater fiscal independence.*

**Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure**

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diprosikan melalui tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2023–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi sebanyak 29 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Data penelitian diperoleh melalui metode dokumentasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena sebagian besar pembiayaannya masih



bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Belanja Modal secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kemandirian keuangan daerah sebesar 68,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah guna mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal**

## PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri, efektif, dan akuntabel. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam menggali sumber pendapatan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting yang menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat (Hidayat, 2024). Semakin tinggi kemandirian keuangan suatu daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki daerah tersebut untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian dan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu tujuan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Yudha, 2022).

Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah tingkat provinsi secara kumulatif justru mengalami sedikit penurunan, dari 55,12% pada tahun 2023 menjadi 54,80% pada tahun 2024, sementara ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih tetap besar. Pola serupa juga terlihat pada tingkat kabupaten/kota, misalnya rasio PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Surabaya yang diproyeksikan turun dari 60,1% pada tahun 2023 menjadi sekitar 58,3% pada tahun 2024 meskipun nilai nominal APBD-nya terus meningkat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD secara nominal tidak selalu diiringi dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah, sehingga peran DAU dan pola belanja, termasuk belanja modal, menjadi semakin relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia (Dwi, 2025).

Secara teoritis, hubungan antara PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui teori agensi (*agency theory*) dan teori desentralisasi fiskal. Teori agensi menempatkan pemerintah daerah sebagai agen yang diberi amanah oleh pemerintah pusat dan masyarakat selaku prinsipal untuk mengelola sumber daya keuangan secara akuntabel dan transparan, sehingga kinerja keuangan daerah menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas amanah tersebut (Ala, 2026). PAD merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber PAD yang sah lainnya, dan menjadi cerminan kapasitas fiskal asli suatu daerah. Sejalan dengan teori desentralisasi fiskal, semakin besar kontribusi PAD dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, sebagaimana dikemukakan oleh (Hutauruk, 2024). Selain PAD, DAU sebagai instrumen *fiscal equalization* bertujuan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah, sementara Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian dan pengadaan suatu



barang untuk prolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal dapat diukur dari belanja tanah, peralatan/mesin, gedung/ bangunan, jalan irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya (Defitri, 2020). Selain kedua teori tersebut, hubungan PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah juga dapat dijelaskan melalui teori *stewardship* (*stewardship theory*), yang dikembangkan oleh (Anton, 2010). Berbeda dengan teori agensi yang menekankan potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, teori *stewardship* memandang pemerintah daerah sebagai pengelola (*steward*) yang pada dasarnya dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan publik, sehingga optimalisasi PAD dan pengelolaan DAU serta Belanja Modal yang efektif diharapkan secara alami mendorong peningkatan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan temuan (Abbas et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif berdasarkan perspektif *stewardship theory* dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah, sekaligus menjadi landasan teoretis tambahan dalam menjelaskan keterkaitan PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini.

Penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan dan memberikan gambaran yang beragam. Penelitian (Hutauruk, 2024) di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Belanja Modal justru berpengaruh negatif signifikan. Penelitian (Kusuma, 2025) di Provinsi Sumatera Barat dan (Frijunita, 2024) sama-sama menemukan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sejalan dengan temuan (Nurjana, 2023) di Provinsi Banten yang menegaskan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, penelitian (Wajib, 2025) di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, meskipun arah pengaruhnya masih menunjukkan hasil yang beragam pada berbagai wilayah penelitian. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi terdahulu tersebut, yaitu sama-sama menggunakan variabel PAD, DAU, dan Belanja Modal sebagai prediktor kinerja atau kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota. Namun, penelitian ini berbeda dari segi objek dan periode penelitian, yaitu berfokus pada kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2023–2024, periode yang relatif belum banyak dikaji dibandingkan wilayah Sumatera yang mendominasi penelitian-penelitian sebelumnya.

Perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini. Variabel Belanja Modal misalnya, pada penelitian (Hutauruk, (2024) ditemukan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan pada penelitian (Kusuma, 2025) dan (Frijunita, 2024) dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan daerah masih belum konsisten, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut pada konteks dan periode yang berbeda. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu juga lebih banyak berfokus pada wilayah Sumatera dengan rentang waktu yang relatif lampau, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa pada periode



terkini, khususnya pada masa pemulihan dan penguatan fiskal daerah tahun 2023–2024 setelah berbagai dinamika ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan (*novelty*) dengan menguji secara simultan pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada objek 29 kabupaten/kota di Pulau Jawa untuk periode 2023–2024, yang merupakan kombinasi objek dan periode yang relatif belum banyak digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam memperkaya bukti empiris mengenai konsistensi pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah, serta memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah kabupaten/kota tahun 2023–2024, guna mencapai kemandirian fiskal dan pelayanan publik yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan objek penelitian yaitu kabupaten/kota DI Pulau Jawa, yang dijadikan sumatera populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten/kota Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti secara eksplisit mencari data yang dapat diakses dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 1.** Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Metode	Hasil	Persyaratan	Keterangan
<b>Normalitas</b>	Kormogorov-Smirnov	0,200	Sig > 0,05	Berdistribusi normal
<b>Multikolinearitas</b>	VIF		VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinearitas
	- PAD	3,458		
	- DAU	2,374		
	- Belanja Modal	2,167		
	Toleransi		Toleransi > 0,10	
	- PAD	0,289		
	- DAU	0,421		
	- Belanja Modal	0,461		
<b>Heteroskedastisitas</b>	Uji Glejser		Sig > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
	- PAD	0,766		
	- DAU	0,244		
	- Belanja Modal	0,564		

Sumber: IBM SPSS 22

Dari hasil Uji Asumsi Klasik dapat dilihat bahwa untuk Uji Normalitas menggunakan metode Kormogorov-Smirnov dengan ketentuan nilai signifikansi > 0,05. Hasil Uji Normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Hal ini dapat di simpulkan bahwa data



berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Begitu juga dengan hasil Uji multikolinearitas dapat dilihat baik dari nilai VIF sebesar 3,458 untuk Pendapatan Asli Daerah, 2,374 untuk Dana Alokasi Umum dan 2,167 untuk Belanja Modal, nilai Toleransi nya yaitu 0,289 untuk Pendapatan Asli Daerah, 0,421 untuk Dana Alokasi Umum dan 0,461 untuk Belanja Modal, hal ini dapat diartikan bahwa multikolinearitas tidak terjadi karena nilai VIF nya  $<10$  dan nilai toleransi nya  $>0,10$ . Uji Heteroskedastisitas juga menunjukkan hasil yang sama dimana nilai signifikansi kedua variabel berada diatas 0,05 yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,766 dan Dana Alokasi Umum sebesar 0,244 serta Belanja Modal Sebesar 0,564 hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Uji Regresi

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
<b>1 (Constant)</b>	0,369	0,028		13,041	0,000
<b>PAD</b>	4,764E-13	0,000	1,214	5,846	0,000
<b>DAU</b>	-2,605E-13	0,000	-1,260	-7,378	0,000
<b>BELANJA MODAL</b>	-1,726E-13	0,000	-0,273	-1,660	0,111

Sumber: IBM SPSS 22

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sangat dipengaruhi dengan naik turun nya Pendapatan Asli Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah besar, maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan didapatkan nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang artinya H1 diterima, sehingga Pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan. Hasil ini juga ditemukan oleh (Nurjana, 2023) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui nilai signifikansi Dana Alokasi Umum adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga H2 diterima, yang artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Semakin tinggi atau besar Dana Alokasi Umum yang didapatkan oleh daerah maka Kemandirian Keuangan Daerah juga akan meningkat. Hasil ini juga selaras dengan hasil yang ditemukan oleh Kusuma, (2025), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Nilai signifikansi Belanja Modal adalah sebesar  $0,111 > 0,05$ , maka H3 ditolak, hal ini menggambarkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal yang dilakukan memang diperuntukkan bagi Pembangunan infrastruktur didaerah namun dampaknya terhadap Kemandirian Keuangan Daerah belum optimal karena kebanyakan Belanja Modal yang dilakukan malah bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli daerah itu sendiri, sehingga bisa dikatakan Belanja Modal yang besar malah meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan, menurunkan Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini juga ditemukan oleh (Kusuma, 2025) dan (Frijunita, 2024) yang mengatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

**Koefisien Determinasi**Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,852 <sup>a</sup>	,726	,688	,04502048

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, DAU, PAD

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Dari hasil uji ditemukan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar 0,688 atau sebesar 68,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor dan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten / kota di pulau Jawa tahun 2023 – 2024. Dana Alokasi Umum (DAU) juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena alokasi belanja modal yang dilakukan masih banyak bergantung pada Dana Transfer pemerintah pusat. Hasil Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa PAD < DAU, dan Belanja Modal mampu menjelaskan variasi kemandirian keuangan daerah sebesar 68,8%, sedangkan sisanya sebesar 31,2% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan Kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, 1(2), 61–80.
- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hidayat, I., & Larasati, N. (2020). Determinan Belanja Modal Provinsi Sepuluh Terbaik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Keuangan: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 154–168.
- Ala. (2026). Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Dwi. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Frijunita. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), TAX EFFORT, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- Hidayat. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat.



- Hutauruk. (2024). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- Kusuma. (2025). Pengaruh PAD, DAU Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Nurjana. (2023). Pengaruh Derajat Kontribusi PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Modal Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten).
- Yudha. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan .
- Wajib. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab Bandung Tahun 2017-2024.